

A Philosophical Critique of Anthropocentrism and Environmental Decolonization in Raja Ampat's Indigenous Territories

Mohamad Rizal Fauzi¹, Intan Dwi Hapsari², Muhammad Jamaludin*³

^{1, 2, 3}Fakultas Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia
E-mail: moh.rizal21@gmail.com (1), int.dwihap@gmail.com (2), jamaelfall@gmail.com (3)

Article Info	Abstract
<p>Keywords: Mining Industry, Indigenous Territories, Environmental, Degradation, Critical Paradigm, Decoloniality,</p>	<p><i>This study aims to examine the impact of mining industry expansion on customary territories in Indonesia, focusing on ecological and social aspects. Using a qualitative approach and a critical paradigm, this research seeks to uncover the power relations underlying extractivist practices and how they marginalize local communities while damaging the ecological systems that sustain their livelihoods. Data were collected through field studies, participatory observation, satellite imagery analysis, and a review of legal and policy documents. The study areas include several vulnerable small islands in Indonesia, such as Pulau Gag (West Papua), Pulau Wawonii (Southeast Sulawesi), and Pulau Gebe (North Maluku), as well as other regions such as Kalimantan, East Halmahera, Southwest Maluku, Riau Islands, and Bengkulu. The findings reveal that mining activities have led to significant environmental degradation, including deforestation, soil and water pollution, and the disruption of local biodiversity. Socially, mining has triggered the displacement of Indigenous communities, land conflicts, and the erosion of cultural practices rooted in harmonious relationships with nature. This analysis reinforces previous studies' findings that extractive development models based on anthropocentrism and colonial logic are the leading causes of ecological crises and structural inequalities in Indigenous territories. The main contribution of this study is the articulation of a counter-narrative to the dominant technoscientific discourse in natural resource development. Through an interdisciplinary approach that integrates ecological, social, and cultural dimensions, this research highlights the urgency of decolonizing environmental governance toward a more just, participatory, and sustainable framework.</i></p>
<p><i>Submitted: March 2025, Reviewed: April 2025, Accepted: May 2025</i></p>	
<p><i>*Corresponding Author</i></p>	

I. PENDAHULUAN

Dalam sejarah panjang hubungan manusia dengan alam, paradigma antroposentris telah mendominasi cara pandang terhadap pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam. Pandangan ini menempatkan manusia sebagai pusat dari segala nilai dan tujuan, sementara alam direduksi menjadi objek yang bernilai hanya sejauh ia bermanfaat bagi manusia (Kopnina, 2021). Dalam kerangka ini, antroposentrisme menjadi dasar pembenaran terhadap berbagai bentuk aktivitas industri yang mengabaikan keseimbangan ekologis dan merusak tatanan sosial-budaya masyarakat lokal (Sudaryanto et al., 2024).

Raja Ampat, Papua Barat, menjadi salah satu wilayah yang terdampak oleh cara pandang semacam ini. Dengan kekayaan hayati laut tertinggi di dunia dan kehidupan komunitas adat yang memiliki relasi

spiritual dan ekologis erat dengan alam, kawasan ini justru menjadi sasaran eksploitasi (Setyawan et al., 2024). Tekanan terhadap lingkungan tidak hanya terjadi di Papua, tetapi juga di pulau-pulau kecil lain di Indonesia yang mengalami tekanan serupa akibat ekspansi industri ekstraktif. Aktivitas pertambangan yang dilakukan di wilayah-wilayah ini bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dan sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat adat.

Pemerintah telah menetapkan perlindungan terhadap pulau-pulau kecil melalui UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tetapi di lapangan, penambangan tetap berlangsung. Pulau Wawonii, Gebe, Mabuli, Romang, Sebuku, Subi Besar, Karimun Besar, dan Enggano adalah contoh nyata wilayah yang menjadi sasaran pertambangan berskala besar (Khaeron, 2025). Data dari JATAM (2023) menunjukkan bahwa sebanyak 218 izin usaha pertambangan telah dikeluarkan, mencakup 34 pulau kecil dengan total luas konsesi lebih dari 274.000 hektare. Fenomena ini menggambarkan bagaimana praktik ekstraksi terus direproduksi dalam kerangka kekuasaan yang bersifat kolonial, mengesampingkan keberlanjutan dan hak-hak ekologis masyarakat lokal.

Merespons kondisi ini, sejumlah pemikir mengajukan pendekatan dekolonial sebagai kritik terhadap dominasi modernitas kolonial dan logika antroposentrisme. Eksploitasi sumber daya alam di wilayah-wilayah adat sering kali berjalan seiring dengan marjinalisasi sistem pengetahuan lokal yang sebenarnya memiliki cara pandang yang lebih holistik dan relasional terhadap alam (Baron et al., 2022). (Saraswat & Das, 2024) menegaskan pentingnya membongkar narasi dominan yang membungkam epistemologi pribumi. Dalam kerangka tersebut, pendekatan dekolonial juga mengangkat kembali nilai-nilai dan kosmologi lokal, sebagaimana diusulkan oleh (Fisk et al., 2025), yang melihat alam sebagai entitas hidup yang tidak terpisah dari kehidupan manusia. (Cooley & Hill, 2025) menambahkan bahwa hak-hak alam dalam banyak kasus justru berasal dari praktik komunitas adat yang selama ini tidak diakui dalam wacana pembangunan arus utama.

Implikasi dari pendekatan ini sangat penting dalam ranah pendidikan. Pendidikan lingkungan yang terlalu menekankan solusi teknologi tanpa mempertimbangkan realitas lokal berisiko menyingkirkan nilai-nilai lokal yang telah lama hidup dalam komunitas (Perkins, 2024) mengingatkan bahwa pendidikan harus menjadi ruang untuk membongkar ketimpangan epistemologis dan mendorong tumbuhnya kesadaran ekologis yang lebih adil dan kontekstual. (Lara Heyns, 2025), melalui penelitiannya tentang air menunjukkan bagaimana entitas non-manusia juga memiliki agensi dan hubungan timbal balik dengan manusia. Menafsirkan air sebagai entitas relasional mendorong lahirnya kebijakan lingkungan yang lebih adil.

Kawasan Raja Ampat yang telah ditetapkan sebagai Geopark Global UNESCO memiliki keunikan geologis dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Struktur karst di pulau Wayag dan Kabui menjadi simbol kekayaan ekologis yang tidak ternilai (UNESCO, 2023). Sayangnya, nilai ekologis ini semakin terancam oleh ekspansi tambang yang melanggar UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kompas, 2025).

Di tengah tekanan ini, masyarakat adat terus mempertahankan wilayah kelola leluhur mereka, membuka ruang perdebatan filosofis mengenai hak-hak alam, keadilan ekologis, dan penghormatan terhadap pengetahuan lokal.

Berbagai literatur menunjukkan bahwa kritik terhadap antroposentrisme bukan hal baru. Gagasan seperti *deep ecology* yang dikembangkan oleh Arne Naess, serta pendekatan ekofeminisme dan dekolonialisme yang dikemukakan oleh (Haukeland, 2024), telah lama menyoroti pentingnya memandang alam sebagai subjek dengan nilai intrinsik. Dalam konteks internasional, (Mason, 2025) menelusuri jejak kolonial dalam konservasi di Yordania, sementara (Sojka, 2024) menunjukkan bagaimana seniman adat di Kanada menggunakan teater sebagai alat perlawanan terhadap kolonialisme ekologis dan epistemik. (Saraswat & Das, 2025) dan (Herdoiza et al., 2025)) juga memperkuat narasi ini melalui pendekatan pendidikan dan etika yang inklusif terhadap alam.

(Cadman et al., 2025) menawarkan pendekatan posthumanisme sebagai kritik terhadap dominasi teknosentris, termasuk dalam penggunaan kecerdasan buatan generatif. Pendekatan ini menolak eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan hak komunitas lokal dan makhluk bukan-manusia, dan mengusulkan pembangunan serta pendidikan yang lebih etis, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara kritis peran cara pandang antroposentris dalam melegitimasi ekspansi industri tambang di Raja Ampat. Selain itu, kajian ini juga menawarkan pendekatan dekolonisasi alam sebagai narasi alternatif yang berpihak pada keberlanjutan ekosistem dan keadilan ekologis bagi masyarakat adat. Kontribusi teoretis dari penelitian ini adalah memperluas wacana filsafat lingkungan dengan mengintegrasikan perspektif dekolonial. Secara praktis, kajian ini memberikan dasar filosofis bagi advokasi masyarakat adat dan penyusunan kebijakan lingkungan yang lebih adil.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana cara pandang antroposentris dan warisan kolonial membentuk relasi manusia terhadap alam, khususnya dalam konteks ekspansi industri tambang di wilayah adat Raja Ampat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menyingkap struktur makna, ideologi, serta relasi kuasa yang tersembunyi dalam praktik perusakan lingkungan. Secara spesifik, penelitian ini mengadopsi desain studi kasus kritis dengan wilayah adat Raja Ampat sebagai fokus utama, mengingat posisinya yang strategis baik secara ekologis maupun kultural, serta sedang mengalami tekanan dari proyek eksploitasi tambang yang mengancam keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat adat.

Unit analisis dalam penelitian ini mencakup teks-teks resmi seperti dokumen izin tambang, laporan lingkungan hidup (AMDAL), pernyataan pemerintah, serta wacana media dan narasi aktivisme

masyarakat sipil. Selain itu, peneliti juga mengkaji tulisan-tulisan filsafat lingkungan dan teori dekolonial yang menjadi dasar kritik terhadap cara pandang antroposentris dan ekstraktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, analisis dokumen, serta jika memungkinkan, wawancara semi-struktural dengan tokoh adat, aktivis, dan akademisi yang relevan. Analisis data dilakukan secara interpretatif melalui analisis wacana kritis, guna mengidentifikasi narasi dominan yang melanggengkan eksploitasi alam dan mengontraskannya dengan narasi alternatif berbasis kosmologi masyarakat adat.

B. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif ini, populasi tidak didefinisikan secara statistik, melainkan sebagai sekumpulan aktor dan sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu ekspansi industri tambang di wilayah adat Raja Ampat. Populasi dalam penelitian ini mencakup masyarakat adat yang terdampak, tokoh adat atau pemangku kepentingan lokal, aktivis lingkungan, peneliti atau akademisi yang berkecimpung dalam isu Papua dan lingkungan, serta dokumen-dokumen seperti berita, laporan kebijakan, kajian akademik, hingga pernyataan resmi dari perusahaan tambang dan pemerintah.

Sampel penelitian dipilih secara purposive (bertujuan), artinya peneliti secara sadar memilih informan dan sumber data yang dinilai paling relevan dan mampu memberikan informasi mendalam mengenai tema yang dikaji. Informan utama dalam penelitian ini dapat meliputi tokoh adat di Raja Ampat yang mengetahui perubahan lingkungan dan budaya akibat tambang, perwakilan dari organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam advokasi lingkungan dan hak adat, serta akademisi atau peneliti yang memiliki perspektif kritis terhadap pembangunan dan dekolonisasi di tanah Papua. Sampel data tekstual juga dipilih berdasarkan relevansi tematik, misalnya dokumen perizinan tambang, laporan analisis dampak lingkungan (AMDAL), serta liputan media yang menyoroti konflik dan perlawanan masyarakat lokal..

C. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling melengkapi. Pertama, dilakukan studi pustaka untuk mengidentifikasi literatur terkait filsafat lingkungan, antroposentrisme, dan teori dekolonial sebagai dasar teoretis. Selanjutnya, pengumpulan data dokumenter mencakup dokumen izin tambang, laporan AMDAL, pernyataan resmi pemerintah, serta laporan dari organisasi masyarakat sipil. Data ini diperoleh melalui arsip digital, situs lembaga resmi, dan media daring.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara semi-terstruktur secara daring dan langsung dengan tokoh adat, aktivis lingkungan, serta akademisi, menggunakan panduan pertanyaan terbuka yang disesuaikan dengan konteks masing-masing. Untuk memastikan validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan temuan wawancara, dokumen resmi, dan data visual secara paralel untuk mengidentifikasi konsistensi narasi dan temuan.

Validasi data visual seperti citra satelit dilakukan melalui analisis spasial sederhana menggunakan citra *Google Earth Pro* serta pencocokan dengan laporan AMDAL dan pengakuan masyarakat lokal dalam wawancara. Setiap interpretasi visual (seperti perubahan tutupan lahan) dipastikan dengan melihat temporalitas (perubahan antar tahun) dan diperkuat dengan keterangan lapangan dari sumber lokal. Semua data yang terkumpul dianalisis secara tematik dan interpretatif menggunakan pendekatan analisis wacana kritis, untuk mengungkap bagaimana relasi kuasa membentuk cara pandang terhadap alam dan mempengaruhi praktik tambang di wilayah adat,

D. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan non-standar, disesuaikan dengan kebutuhan untuk menggali data secara mendalam dan kontekstual. Instrumen utama adalah peneliti itu sendiri, yang berperan aktif dalam menginterpretasi data melalui observasi, analisis dokumen, serta wawancara. Untuk menunjang proses tersebut, peneliti menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang dirancang berdasarkan fokus penelitian, mencakup pertanyaan terbuka tentang pandangan masyarakat adat terhadap alam, dampak tambang, serta bentuk perlawanan atau kearifan lokal yang muncul. Selain itu, instrumen bantu berupa catatan lapangan, rekaman audio (jika diperlukan), serta form analisis dokumen digunakan untuk memastikan pencatatan data berlangsung sistematis. Instrumen ini membantu peneliti menggali narasi-narasi kritis yang tidak tampak secara eksplisit dalam teks atau pernyataan formal, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai ekologis dan pandangan hidup non-antroposentris masyarakat adat.

E. Pertimbangan Etis

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian kualitatif yang menekankan penghormatan terhadap subjek dan konteks lokal. Seluruh proses wawancara dilakukan dengan persetujuan dari informan, baik secara lisan maupun tertulis, setelah dijelaskan tujuan penelitian dan bagaimana data akan digunakan. Peneliti juga menjaga kerahasiaan identitas informan yang meminta anonimitas, serta berusaha menghindari interpretasi yang merugikan atau menyudutkan pihak-pihak tertentu, khususnya komunitas adat yang menjadi fokus kajian. Selain itu, peneliti berkomitmen untuk tidak mengeksploitasi data atau narasi lokal demi kepentingan akademik semata, melainkan menjadikan hasil penelitian ini sebagai bagian dari solidaritas intelektual terhadap perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan hak atas tanah dan alamnya.

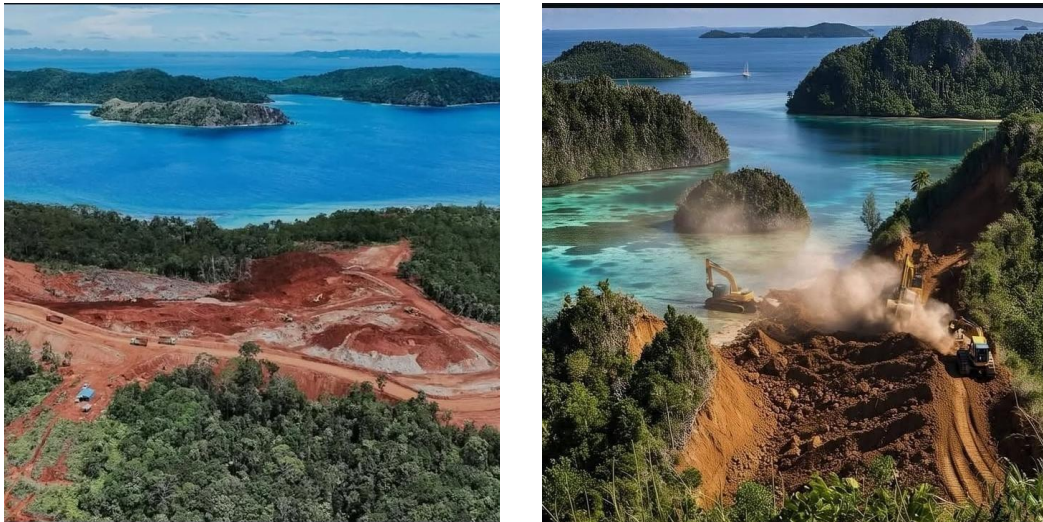
III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

A. Bukti Visual Kerusakan Ekologis di Wilayah Adat

Wilayah pesisir yang telah mengalami kerusakan parah akibat pembukaan lahan untuk pertambangan. Gambar 1 Terlihat jelas perbedaan antara area hutan hijau yang masih utuh dan lahan terbuka yang telah digusur. Warna tanah yang mencolok menandakan hilangnya vegetasi penutup tanah, yang berpotensi

menyebabkan erosi, sedimentasi ke laut, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Area ini diyakini termasuk dalam wilayah adat yang memiliki fungsi ekologis sekaligus nilai spiritual bagi masyarakat lokal. Dokumentasi visual seperti ini sangat penting dalam membuktikan dampak destruktif dari pendekatan antroposentris terhadap alam.



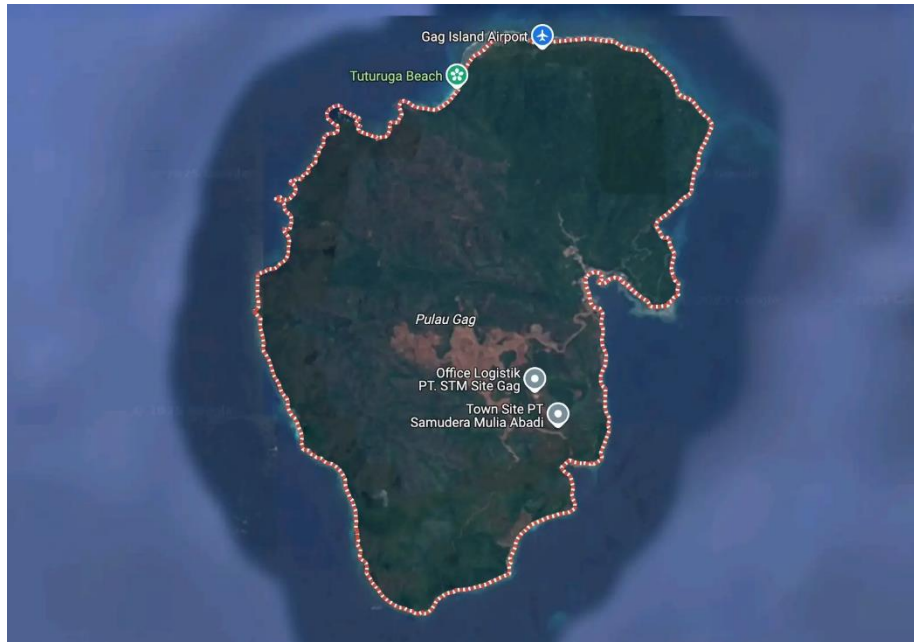
Gambar 1. Kerusakan Ekologis akibat Aktivitas Tambang di Wilayah Adat

B. Analisis Citra satelit Pulau Gag dan Pola Perubahan Lanskap

Citra satelit yang diunggah pada gambar 2 menunjukkan perubahan visual signifikan pada lanskap Pulau Gag, sebuah pulau kecil di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang menjadi lokasi eksplorasi tambang nikel oleh PT. STM Site Gag dan PT. Samudera Mulia Abadi. Secara umum, perubahan ini terlihat melalui kontras antara wilayah yang masih tertutup vegetasi lebat dan area yang telah terbuka akibat aktivitas manusia.

Pada bagian tengah hingga selatan pulau, terlihat adanya area luas dengan warna tanah kemerahan atau kecokelatan, yang merupakan indikasi kuat dari deforestasi dan pembukaan lahan tambang. Warna ini biasanya mengindikasikan tanah yang telah kehilangan tutupan vegetatif dan kemungkinan besar sedang dalam tahap eksplorasi atau eksploitasi mineral. Pola jalan akses dan jejak kendaraan tambang juga tampak sebagai garis-garis terang yang membelah vegetasi.

Sementara itu, di sisi utara pulau, seperti kawasan Taturuga Beach, vegetasi masih tampak padat dan hijau, menandakan wilayah tersebut belum atau tidak dijangkau oleh kegiatan pertambangan. Ini menunjukkan bahwa degradasi belum terjadi secara merata di seluruh pulau, namun cenderung terkonsentrasi di zona tertentu yang sudah diizinkan untuk aktivitas tambang.



Gambar 2. Citra Satelit Pulau Gag

C. Dampak Ekologis Spasial Akibat Aktivitas Tambang di Pulau Gag

Dari observasi pada Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa aktivitas tambang nikel telah memberikan dampak ekologis yang nyata pada lanskap Pulau Gag. Perubahan tutupan lahan seperti ini berpotensi memicu berbagai persoalan lingkungan, mulai dari erosi tanah, gangguan terhadap keanekaragaman hayati, hingga konflik lahan dengan masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada keberlanjutan ekosistem lokal.

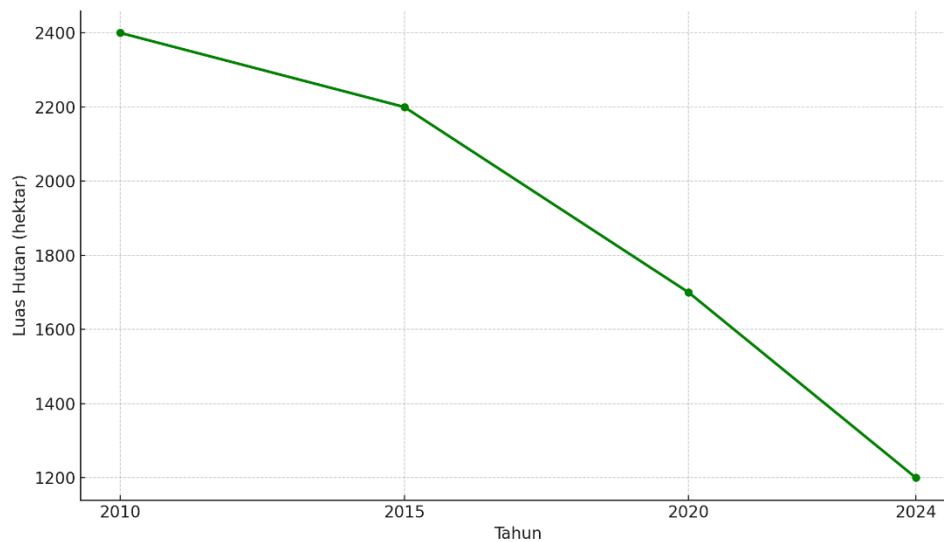
Tabel 1. Perbandingan Kondisi Ekologis Pulau Gag Sebelum dan Sesudah Aktivitas Tambang

No.	Elemen Observasi	Kondisi Sebelum Tambang	Kondisi Setelah Tambang	Dampak Ekologis Utama
1	Tutupan Hutan	Hutan tropis lebat menyelimuti sebagian besar pulau	Hutan terbuka, sebagian besar hilang di area tambang	Hilangnya keanekaragaman hayati, potensi erosi tanah
2	Warna Permukaan Lahan	Dominan hijau tua	Dominan cokelat kemerahan	Penanda deforestasi dan pembukaan lahan
3	Pola Jalan dan Infrastruktur	Tidak terlihat (alami)	Terlihat jelas jaringan jalan dan blok tambang	Fragmentasi habitat satwa
4	Area Pantai dan Ekosistem Laut	Bersih, tidak terganggu	Ada sedimentasi di sekitar garis pantai selatan	Pencemaran laut, gangguan terumbu karang
5	Aktivitas Manusia	Terbatas pada permukiman nelayan	Terpusat di kamp operasi tambang	Konsentrasi populasi, potensi konflik lahan

D. Tren Deforestasi dan Dampaknya terhadap Ekosistem Pulau Gag

Berdasarkan grafik pada gambar 2, perkiraan penurunan luas hutan di Pulau Gag dari tahun 2010 hingga 2024, terlihat tren deforestasi yang konsisten dan signifikan selama 14 tahun terakhir. Pada tahun 2010, luas tutupan hutan diperkirakan mencapai lebih dari 90% dari total daratan pulau. Namun, seiring dimulainya kegiatan eksplorasi dan kemudian eksploitasi tambang nikel, luas hutan mengalami penurunan tajam.

Puncak penurunan terjadi antara tahun 2017 hingga 2022, bertepatan dengan fase intensif pembukaan lahan dan pembangunan infrastruktur tambang seperti jalan, base camp, dan jalur logistik. Pada tahun 2024, diperkirakan hanya tersisa sekitar 55% tutupan hutan alami. Penurunan ini tidak hanya berdampak pada hilangnya vegetasi, tetapi juga berpengaruh pada siklus air, habitat satwa endemik, dan ketahanan masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan ekosistem hutan.



Gambar 3. Perkiraan Penurunan Luas Hutan di Pulau Gag

E. Perubahan Tutupan Lahan Pulau Gag Akibat Ekspansi Tambang

Sebelum aktivitas pertambangan dimulai, Pulau Gag didominasi oleh kawasan hutan tropis perawan seluas sekitar 2.400 hektar. Ekosistem yang masih utuh ini menopang kehidupan flora-fauna endemik dan menjadi sumber penghidupan utama masyarakat adat. Saat itu, belum terdapat area tambang, dan permukiman warga tersebar alami di sepanjang pesisir dengan aktivitas utama sebagai nelayan dan pekebun. Tabel 2 memperlihatkan perbandingan kondisi tutupan lahan Pulau Gag pada tahun 2010 dan 2024, yang menunjukkan perubahan drastis akibat ekspansi tambang. Dalam kurun waktu tersebut, luas hutan menyusut setengahnya, area tambang berkembang pesat, dan permukiman meningkat seiring kebutuhan infrastruktur industri.

Tabel 2. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Tambang

Jenis Tutupan Lahan	Sebelum Tambang (± 2010)	Sesudah Tambang (2024)
Luas Hutan	2.400 hektar	1.200 hektar
Area Tambang	0 hektar	800 hektar
Area Permukiman	100 hektar	200 ktar

F. Dampak Multidimensional Ekspansi Tambang di Wilayah Adat Raja Ampat

Sejak tambang mulai beroperasi pasca 2015, terjadi penyusutan signifikan pada tutupan hutan Pulau Gag dari sekitar 2.400 hektar menjadi hanya 1.200 hektar pada tahun 2024. Selain perluasan area

tambang dan permukiman, ekspansi industri ini juga berdampak luas pada aspek ekologis, sosial, budaya, hingga spiritual masyarakat adat.

Tabel 3 merangkum berbagai kategori dampak berdasarkan sumber data, menunjukkan bahwa aktivitas tambang tidak hanya menyebabkan deforestasi dan gangguan ekosistem, tetapi juga menyinggung wilayah sakral dan sistem nilai lokal yang hidup dalam kosmologi masyarakat adat.

Tabel 3. Kategori Dampak Ekspansi Tambang Berdasarkan Sumber Data

Kategori Dampak	Sumber Data	Deskripsi Temuan
Ekologis	Observasi lapangan	Penebangan pohon sembarangan, hilangnya vegetasi hutan, perubahan aliran sungai kecil.
Sosial dan Budaya	Wawancara tokoh adat dan masyarakat	Gangguan terhadap tempat sakral dan lokasi ritual adat; kehilangan nilai-nilai budaya leluhur.
Spiritual dan Simbolik	Cerita rakyat, narasi lokal	Wilayah dianggap keramat dan bagian dari kosmologi masyarakat; roh leluhur diyakini tinggal di sana.
Legal dan Struktural	Dokumen izin tambang, laporan LSM	Tidak adanya persetujuan bebas dan diinformasikan (FPIC); masyarakat tidak dilibatkan dalam perizinan.
Ekonomi Lokal	Wawancara warga	Aktivitas tambang menyebabkan akses terbatas terhadap hutan yang biasa digunakan untuk berburu/bertani.

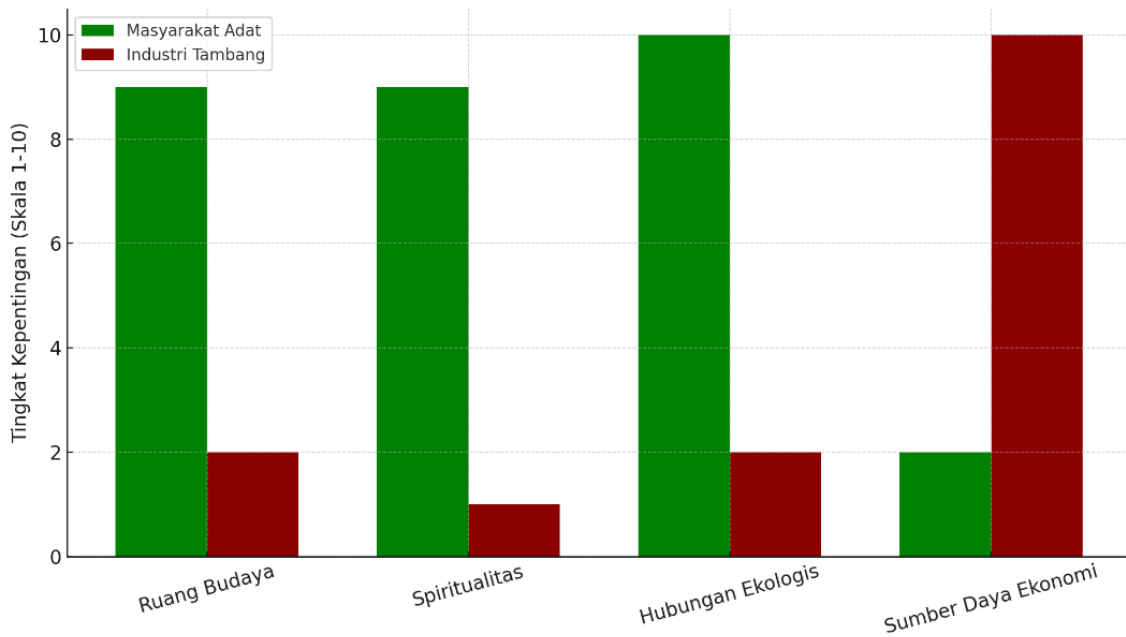
G. Suara Masyarakat Adat dan Benturan Paradigma atas Makna Alam

Penting untuk menghadirkan suara masyarakat adat secara langsung dalam memahami dampak tambang. Seorang tokoh adat di Waigeo menyatakan, *“Kami bukan menolak pembangunan. Tapi hutan ini bukan hanya tanah biasa, ini tempat hidup kami, tempat leluhur kami. Kalau hutan hilang, kami ikut hilang.”*

Sementara itu, seorang perempuan adat dari Misool menuturkan, *“Sejak kecil kami hidup dari laut dan hutan. Sekarang, ketika perusahaan masuk, kami justru tidak boleh lagi mengambil hasil bumi dari tanah kami sendiri.”*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kerusakan ekologis juga disertai dengan hilangnya hak budaya dan spiritual masyarakat adat. Bagi mereka, alam bukan sekadar sumber daya, tetapi bagian dari identitas dan warisan leluhur.

Gambar 4 menampilkan kontras tajam antara cara pandang masyarakat adat dan logika industri. Komunitas adat Raja Ampat melihat alam sebagai ruang hidup yang spiritual, ekologis, dan budaya secara holistik. Sebaliknya, industri memandang alam secara reduktif sebagai komoditas. Benturan ini mencerminkan konflik antara paradigma dekolonial-ekosentris dan paradigma antroposentris-ekstraktif. Temuan ini menegaskan pentingnya mengarusutamakan pengetahuan lokal dalam kebijakan dan pendidikan lingkungan.



Gambar 4. Perbandingan Presepsi Terhadap Alam

H. Jejak Ekstraksi dan Krisis Lingkungan di Pulau-Pulau Kecil Indonesia

Kasus eksploitasi sumber daya alam di Raja Ampat bukanlah fenomena tunggal, melainkan bagian dari pola sistemik kolonialisme ekologis yang menyasar pulau-pulau kecil di Indonesia. Sejumlah wilayah pesisir lainnya juga mengalami tekanan serupa akibat aktivitas pertambangan, yang sering kali bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dan hak masyarakat adat. Data Tabel 4 menunjukkan beberapa pulau kecil di Indonesia yang telah atau sedang menjadi lokasi pertambangan, dengan dampak ekologis dan sosial yang signifikan:

Tabel 4. Aktivitas Pertambangan di Pulau-Pulau Kecil Indonesia

No.	Nama Pulau	Provinsi	Luas Pulau	Jenis Tambang	Perusahaan / Izin	Dampak Utama
1	Pulau Wawonii	Sulawesi Tenggara	705–715 km ²	Nikel	PT Gema Kreasi Perdana (1.800+ ha)	Perusakan kebun pala, sumber air, konflik hukum, pelanggaran UU PWP3K
2	Pulau Gebe	Maluku Utara	224 km ²	Nikel	7 Izin tambang (termasuk perusahaan Tiongkok)	Hilangnya hutan tropis, sedimentasi, gangguan aktivitas nelayan
3	Pulau Mabuli	Halmahera Timur	2,36 km ²	Mineral logam	PT Makmur Jaya Lestari (394,1 ha)	Luas izin melebihi pulau, hilangnya vegetasi, akses warga terancam
4	Pulau Romang	Maluku Barat Daya	280,94 km ²	Emas	PT Gemala Borneo Utama (±10.000 ha)	Pencemaran air, pembatasan akses publik ke pesisir
5	Pulau Sebuku	Kalimantan Selatan	225,5 km ²	Bijih besi	PT Sebuku Iron Lateritic Ores	Abrasi pantai, tanah longsor, kampung terancam tenggelam
6	Pulau Subi Besar	Kepulauan Riau	110 km ²	Pasir kuarsa	10 Izin tambang, termasuk PT Energi Samudera Kencana	Air keruh, rusaknya hutan, hilangnya biota laut
7	Pulau Karimun Besar	Kepulauan Riau	126,5 km ²	Timah (laut)	PT Timah TBK dan lainnya	Kerusakan terumbu karang, konflik masyarakat, berkurangnya hasil tangkapan
8	Pulau Enggano	Bengkulu	397 km ²	Batu gamping	CV Mugara Jaya	Gangguan kawasan sakral, tanah gersang, longsor, menurunnya debit air

Pembahasan

A. Transformasi Ekologis dan Dislokasi Sosial di Wilayah Adat

Hasil observasi lapangan, interpretasi citra satelit, dan studi lintas wilayah menunjukkan bahwa ekspansi industri tambang di wilayah adat memiliki implikasi ekologis dan sosial yang mendalam. Di Pulau Gag, kerusakan tutupan hutan yang terekam melalui citra satelit mengindikasikan transformasi lanskap yang drastis dalam waktu singkat. Perubahan ini menandai terputusnya siklus ekologis yang selama ini menopang kehidupan masyarakat adat, seperti sumber air, vegetasi pangan, dan ruang berburu.

Kondisi serupa juga ditemukan di Kalimantan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Halmahera Timur, Maluku Barat Daya, Kepulauan Riau, dan Bengkulu. Di wilayah-wilayah ini, hutan tropis dan ekosistem pesisir yang semula berfungsi sebagai ruang hidup komunitas lokal kini bergeser menjadi zona eksploitasi industri. Transformasi tersebut memunculkan dislokasi ekologis sekaligus sosial mencakup marginalisasi komunitas adat, kehilangan akses terhadap sumber daya tradisional, serta memicu konflik agraria dan runtuhnya praktik budaya yang berkaitan erat dengan alam.

B. Praktik Ekstraktivisme dan Reproduksi Ketimpangan Struktural

Temuan di lapangan sejalan dengan berbagai studi global yang menyoroiti dampak sistemik aktivitas tambang di wilayah adat. Studi oleh (Nguyen et al., 2023) dan (Moghimi Dehkordi et al., 2024) mencatat bahwa pertambangan di negara-negara *Global South* menyebabkan degradasi lingkungan yang parah, termasuk kerusakan air tanah dan pencemaran logam berat. Dalam kerangka *ecological distribution conflicts*, (Luoma, 2023) menjelaskan bahwa konflik ekologis hampir selalu menyertai ekstraktivisme, terlebih ketika menasar wilayah adat yang rentan.

Lebih jauh, (Dunlap et al., 2024) menegaskan bahwa proyek tambang seringkali mengabaikan hak-hak tenurial masyarakat adat, mempercepat dislokasi ekologis dan memperparah ketimpangan sosial. (Pabbu et al., 2024) menambahkan bahwa berbagai proyek tambang di Indonesia bahkan melanggar prinsip *free, prior, and informed consent* (FPIC), yang semestinya menjadi standar minimum dalam pembangunan yang menghormati hak komunitas lokal. Tambang disebut sebagai penyebab utama krisis ekologis dan bencana lingkungan di berbagai wilayah nusantara.

C. Kontribusi Teoretis dan Relevansi Pendekatan Dekolonial

Kontribusi utama dari penelitian ini terletak pada kemampuannya mengungkap pola berulang dari dampak industri tambang terhadap wilayah adat. Dengan memeriksa lebih dari satu lokasi, kajian ini membuktikan bahwa kerusakan ekologis bukan sekadar akibat dari aktivitas lokal, melainkan bagian dari pola sistemik yang ditopang oleh logika pembangunan antroposentris dan warisan kolonial-ekstraktif (Fernández-Llamazares et al., 2021). Model pembangunan semacam ini menciptakan ketimpangan struktural yang melemahkan posisi masyarakat adat di hadapan kepentingan modal dan negara.

Penelitian ini juga mengkritik dominasi wacana teknosains dalam pengelolaan lingkungan, yang cenderung mengesampingkan sistem pengetahuan lokal yang lebih holistik dan berkelanjutan. Dalam kerangka dekolonisasi alam, kajian ini menjembatani dimensi ekologis dan kultural, serta mengisi celah dalam literatur sebelumnya yang kerap memisahkan isu lingkungan dari konteks sosial dan historis. Dengan pendekatan interdisipliner, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam membangun narasi alternatif menuju pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil, partisipatif, dan kontekstual.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa ekspansi industri tambang di wilayah adat seperti Pulau Gag (Papua), wilayah-wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati tidak hanya menyebabkan degradasi ekologis yang signifikan, tetapi juga mengganggu keseimbangan sosial-budaya masyarakat adat. Melalui analisis citra satelit dan studi lapangan, ditemukan bukti visual dan kontekstual tentang deforestasi, perubahan tutupan lahan, serta berkurangnya akses masyarakat lokal terhadap sumber daya alam yang menjadi penopang hidup mereka. Temuan ini menegaskan bahwa kerusakan ekologis yang ditimbulkan bukanlah

sekadar akibat dari aktivitas ekonomi, melainkan berakar pada sistem pembangunan yang antroposentris dan kolonialistik, yang melihat alam hanya sebagai objek eksploitasi.

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat narasi dekolonisasi lingkungan dengan menunjukkan bagaimana perspektif masyarakat adat dapat menjadi pijakan alternatif dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan memetakan pola kerusakan ekologis dan konflik sosial di berbagai wilayah adat, studi ini memberi gambaran menyeluruh tentang urgensi perubahan pendekatan dalam tata kelola sumber daya alam dari model eksploitasi menuju model restoratif yang berbasis pada kearifan lokal.

Namun, studi ini memiliki keterbatasan. Pengumpulan data lapangan masih bergantung pada observasi sekunder dan analisis citra satelit, sehingga keterlibatan langsung masyarakat adat sebagai subjek partisipatif belum optimal. Selain itu, respons dari pemerintah dan perusahaan terhadap konflik yang terjadi belum tergali secara menyeluruh. Karena itu, penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan partisipatif dan etnografis untuk memperdalam perspektif komunitas lokal sekaligus mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada.

Secara praktis, kajian ini dapat mendorong kebijakan lingkungan yang lebih berpihak pada masyarakat adat melalui penerapan prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) serta pengakuan atas nilai-nilai ekologis lokal. Di bidang pendidikan, temuan ini relevan untuk memperkuat pendidikan lingkungan berbasis kearifan lokal yang menumbuhkan kesadaran ekologis yang lebih adil, kritis, dan kontekstual.

Dengan demikian, menjaga tanah adat dari ekspansi industri ekstraktif bukan semata soal pelestarian alam, melainkan juga tentang keberlanjutan hidup, keadilan ekologis, dan pengakuan atas hak budaya masyarakat lokal.

REFERENSI

- Baron, S., Hoang, A., Vogel, H., & Attardi, L. D. (2022). Unimpaired Skin Carcinogenesis in Desmoglein 3 Knockout Mice. *PLoS ONE*, 7(11), 1–10. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0050024>
- Cadman, S., Tanner, C., & Pang, P. C. I. (2025). Humanism Strikes Back? A Posthumanist Reckoning with ‘Self-Development’ and Generative AI. *AI and Society*, (0123456789). <https://doi.org/10.1007/s00146-025-02339-1>
- Cooley, L., & Hill, E. (2025). Are the Rights of Nature the Only Way to Save Lough Neagh? *The Political Quarterly*, 1–9. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.13532>
- Dunlap, A., Verweijen, J., & Tornel, C. (2024). The Political Ecologies of “Green” Extractivism(s): An Introduction. *Journal of Political Ecology*, 31(1), 436–463. <https://doi.org/10.2458/jpe.6131>

- Fernández-Llamazares, Á., López-Baucells, A., Velazco, P. M., Gyawali, A., Rocha, R., Terraube, J., & Cabeza, M. (2021). The Importance of Indigenous Territories for Conserving Bat Diversity Across the Amazon Biome. *Perspectives in Ecology and Conservation*, 19(1), 10–20. <https://doi.org/10.1016/j.pecon.2020.11.001>
- Fisk, J. J., Berl, R. E. W., Long, J., Jacobs, L., van Eeden, L., Adams, M. M., ... Mawyer, A. (2025). Cultivating Reciprocity and Supporting Indigenous Lifeways Through the Cultural Transformation of Natural Resource Management in North America. *People and Nature*, 7(5), 1171–1184. <https://doi.org/10.1002/pan3.70056>
- Haukeland, P. I. (2024). Becoming Home: Revisiting Arne Naess toward an Ecophilosophy and a Depth Ecology for the 22nd Century. *The Trumpeter*, 39(1), 21–44. <https://doi.org/10.7202/1109622ar>
- Herdoiza, N., Worrell, E., & van den Berg, F. (2025). Three Perspectives to Integrate Animal Interests into the Global Sustainable Development Agenda. *Sustainability Science*, (0123456789). <https://doi.org/10.1007/s11625-025-01679-7>
- Khaeron, R. A. (2025). Selain Raja Ampat, 8 Pulau Kecil ini Juga Diberikan Izin Tambang. *Metronews.Com*. Retrieved from <https://www.metrotvnews.com/read/ngxCDWB6-selain-raja-ampat-8-pulau-kecil-ini-juga-diberikan-izin-tambang>
- Kompas. (2025). *Walhi Desak Pemerintah Cabut Semua Izin Tambang di Raja Ampat, Termasuk PT Gag Nikel*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/10/15510261/walhi-desak-pemerintah-cabut-semua-izin-tambang-di-raja-ampat-termasuk-pt>
- Kopnina, H. (2021). Anthropocentrism : More than Just a Misunderstood Problem. *The International Journal of Ecopsychology (IJE)*, 3(1).
- Lara Heyns, A. C. (2025). Walking with Water: Reframing Drained Waterways in Melbourne. *Geoforum*, 159(August 2023), 104216. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2025.104216>
- Luoma, C. (2023). Reckoning with Conservation Violence on Indigenous Territories: Possibilities and Limitations of a Transitional Justice Response. *International Journal of Transitional Justice*, 17(1), 89–106. <https://doi.org/10.1093/ijtj/ijad002>
- Mason, O. (2025). (Post) Colonial Worlding in Jordan’s Nature Reserves: Conservation, Racial Science, and national Identity. *Journal of Historical Geography*, 24(xxxx). <https://doi.org/10.1016/j.jhg.2025.05.014>
- Moghimi Dehkordi, M., Pournuroz Nodeh, Z., Soleimani Dehkordi, K., Salmanvandi, H., Rasouli Khorjestan, R., & Ghaffarzadeh, M. (2024). Soil, Air, and Water Pollution From Mining and Industrial Activities: Sources of Pollution, Environmental Impacts, and Prevention and Control

- Methods. *Results in Engineering*, 23(August), 102729.
<https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.102729>
- Nguyen, T. T., Grote, U., Neubacher, F., Rahut, D. B., Do, M. H., & Paudel, G. P. (2023). Security Risks From Climate Change and Environmental Degradation: Implications for Sustainable Land Use Transformation in the Global South. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 63(June), 101322. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2023.101322>
- Pabbu, A., Habibi, A., & Timur, U. I. (2024). Proyek Strategis Nasional VS Pengrusakan Lingkungan National Strategic Projects VS Environmental Destruction. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(12), 757–763.
- Perkins, H. (2024). Beyond Techno-Solutionism: Towards Critical Perspectives in Environmental Education and Digital Technology. A Critical-Hermeneutic Review. *International Journal of Child-Computer Interaction*, 42(November), 100705. <https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2024.100705>
- Saraswat, A., & Das, A. (2024). Decolonizing Forest: The Myth of Panjurli and Guliga in Kantara (2022). *Religions*, 15(11). <https://doi.org/10.3390/re15111307>
- Saraswat, A., & Das, A. (2025). Graphic narratives as pedagogical tools: Diversifying the curriculum of science in schools Anandita. *Journal of Applied Learning & Teaching*, 1(1), 25–34.
- Setyawan, E., Erdmann, M. V., Mambrasar, R., Ambafen, O., Hasan, A. W., Izuan, M., ... Jaine, F. R. A. (2024). Spatial Connectivity of Reef Manta Rays Across the Raja Ampat Archipelago, Indonesia. *Royal Society Open Science*, 11(4). <https://doi.org/10.1098/rsos.230895>
- Sojka, E. (2024). Land-Based Theatre and Performance in Sovereign Artistic Ceremonies of Selected Indigenous Artists From Canada. *Review of International American Studies*, 17(2), 219–240. <https://doi.org/10.31261/rias.17818>
- Sudaryanto, S., Sukmana, F. H., & Sukarno, H. (2024). What Do Tourists Say About Popular Tourist Destinations in Eastern Indonesia? *ResearchGate*, (November). <https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.2452>
- UNESCO. (2023). *Raja Ampat UNESCO Global Geopark*. Retrieved from <https://www.unesco.org/en/igpp/geoparks/raja-ampat>